

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya.¹

Sementara itu kemiskinan adalah persoalan semua orang dan semua pihak. Ia akan tetap ada dimana dan kapan saja. Kita semua bertanggung jawab untuk menghapuskannya, minimal menguranginya. Adalah tugas utama negara untuk menghapuskan kemiskinan dan meratakan distribusi kekayaan, sehingga tercapailah keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan.

Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi adalah pangkal kejahatan dan kekacauan masyarakat yang akhirnya akan membawa kehancuran.²

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah

¹ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 198

² *Ibid.*

masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.³

Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar), pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah), dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). Sementara itu, World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.⁴

Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, instansi ini juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negeri. Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret 2013) menjadi 0,48%.⁵ Artinya

³Badan Pusat Statistik, "*Garis Kemiskinan*", artikel diakses pada 8 Desember 2014 dari <http://.bps.go.id/subjek/view/id/23#subjekviewtab1accordion-daftar-subjek1>.

⁴*Ibid.*

⁵Maikel Jefriando, "*Indeks Keparahannya kemiskinan*", artikel diakses pada 2 Januari 2015 dari <http://Finance.detik.com/read/2014/01/02/152910/2456793/4/bps-akui-kemiskinan-di-Indonesia-semakin-dalam-dan-parah>.

tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Sebab berada menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Apabila dibandingkan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat secara kedalaman perkotaan sebesar 1,41% dan perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu 2,37%. Sementara nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,37% sementara di daerah perdesaan sebesar 0,60%.

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Angka kemiskinan di Payakumbuh, masih tercatat cukup tinggi, jika dibandingkan dengan data BPS. Hal itu terlihat dari data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang berjumlah 34.128 jiwa yang sudah terregistrasi oleh pemerintah pusat melalui BPJS. Kemudian, menurut data Dinkes masih ada keluarga miskin yang belum terregister sebanyak 1.673 jiwa lagi. Kalau diakumulasikan, berarti di Payakumbuh tercatat 35.801 warga miskin di kota ini.⁶

Sementara itu lumbung kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Koto terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perdesaan, dimana penduduk yang sangat

⁶Ranah Berita, "*Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Pemkot Payakumbuh Lakukan Validasi*," diakses pada 20 Januari 2015 dari <http://ranahberita.com/42305/angka-kemiskinan-masih-tinggi-pemkot-payakumbuh-lakukan-validasi>

miskin mencapai 73 persen dan penduduk miskin 71,60 persen yang berada pada lapangan usaha pertanian dan perkebunan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Kegiatan pertanian di perdesaan didominasi oleh usaha skala mikro yang salah satu permasalahan mendasar yang mereka hadapi adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan karena ketersediaan agunan, disamping jaminan pasar, teknologi, dan organisasi petani yang masih lemah (Kementerian Pertanian, 2010). Salah satu program bantuan dana yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) melalui pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Gapoktan peserta program sebesar seratus juta rupiah. Melalui program ini diharapkan akan mempermudah dan memperluas akses petani yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan modal usaha produktif.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan

pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antara subsektor. Pelaksanaan PUAP terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 16/ Permentan/ OT.140/03/2009 yang membahas tentang pedoman umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Keberlanjutan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sangat ditentukan pada keberhasilan pengelolaan dana tersebut oleh Gapoktan sebagai lembaga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya program pemerintah ini dalam bentuk bantuan modal kepada petani sering mengalami kegagalan dan tidak efektif baik dari mekanisme penyaluran maupun dari pengelolaan dana tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah terbatasnya kemampuan kelembagaan petani mengelola dana tersebut, intensitas pendampingan program yang belum optimal, dan penegakan aturan hukum yang tidak tegas.

Selain itu program bantuan dana dari pemerintah sering direncanakan dari atas (top-down) dengan pedoman yang sama untuk setiap wilayah dengan asumsi bahwa kondisi petani pelaksana program adalah relatif sama dan mampu melaksanakannya dengan baik, padahal pada saat implementasi program dilapangan, kesiapan petani dalam melaksanakan program tersebut dan kondisi lapangan sangat beragam, sehingga keberhasilan pelaksanaan program juga beragam.

Namun ketika ditinjau kelapangan, terdapat beberapa tanggapan anggota Gapoktan , seperti kasus yang telah sukses yaitu ibu Ermi dengan pinjaman Rp

1.000.000 dapat meningkatkan usaha holtikultura yaitu dalam bercocok tanam sayur – sayuran yang telah berhasil dalam mengelola usahanya. Ada juga kasus setengah sukses yaitu Bapak Nopi yang mendapatkan tambahan modal dana PUAP sebesar Rp1.000.000,- ia menggunakannya untuk mengelola ladang gambir yang telah lama tidak digarap karena keterbatasan modal, tapi modal yang di dapat belum mencukupi. Ada juga kasus yang tidak sukses seperti Ibu Asmita yang meminjam Rp 2.000.000 untuk usaha peternakan ayam, namun peternakannya sudah tidak dijalankan lagi, dan termasuk orang yang perekonomiannya mampu, tapi karena tidak adanya tanggung jawab maka pembayaran macet dan usaha yang dilakukannya tidak berkembang.⁷

Oleh karena adanya kasus anggota Gapoktan yang telah sukses, setengah sukses dan kasus anggota Gapoktan yang belum sukses dari program bantuan dana pemerintah kepada petani belum optimal, maka timbul persepsi negatif pada tingkat petani bahwa bantuan pemerintah merupakan hibah atau bantuan cuma-cuma sehingga digunakan untuk kebutuhan konsumtif yang mengakibatkan tujuan program untuk pemberdayaan usaha produktif pertanian secara berkelanjutan menjadi tidak tercapai.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

⁷Ermis, Nopi, Asmita, (Anggota Gapoktan), Jorong Lubuak Simato, *Wawancara*, 20 November 2014

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum, mengemukakan: efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.⁹

Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa: efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan

⁸Soewarno Handayani S., *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm.16

⁹Georgo Polous dan Tannenbaum, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 50

¹⁰Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, (alih bahasa M. Yamin), (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 87

pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa: efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹¹

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Pengelolaan menurut Soekanto adalah salah satu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Pengelolaan yang dimaksud disini pengelolaan dana PUAP untuk usaha agribisnis. Sedangkan agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi: subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian, subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu, subsistem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian, dan subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.¹²

Di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Jorong Lubuak Simato, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah berlangsung lebih daritiga tahun, dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lubuak Simatoyang merupakan

¹¹Hidayat, *Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1986), hlm. 27

¹²Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*, 2009, hlm. 4

kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.

Selama kurun waktu 3 tahun sampai dengan tahun 2014 kegiatan perkembangan modal Gapoktan Lubuak Simato adalah sebanyak Rp 127.688.000 dan sudah disalurkan dalam berupa pinjaman sejumlah Rp 111.748.000 kepada 357 anggota Gapoktan.¹³

Tabel 1
Perkembangan Modal dan Penyaluran Pinjaman
Gapoktan Lubuak Simato tahun 2012-2014

Tahun	Modal (Funding)(Rp)	Pinjaman (Lending)(Rp)	Rasio (%)	Rasio Pertumbuhan (%)
2012	125.235.000	98.760.000	80,46	-
2013	124.780.000	101.278.000	79,56	-1,11
2014	127.688.000	111.748.000	87,52	10,00

Sumber :Pengurus Gapoktan Lubuak Simato tahun 2014, diolah.

Dari tabel diatas terlihat perkembangan rasio pinjaman terhadap modal ditahun 2012 adalah 80,46% untuk kemudian turun menjadi 79,56% ditahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan secara signifikan ditahun 2014 sebesar 87,52%. Artinya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Kemudian bila dilihat dari realisasi penyaluran dana(*lending*)selama tiga tahun terakhir belum memenuhi target seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

¹³Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Gapoktan Lubuak Simato tahun 2014

Tabel 2
Realisasi Penyaluran Pinjaman
Gapoktan Lubuak Simato tahun 2012-2014

Tahun	Target/Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	105.000.000	98.760.000	94.06
2013	115.000.000	101.278.000	88.07
2014	120.000.000	111.748.000	93.12

Sumber :Pengurus Gapoktan Lubuak Simato tahun 2014, diolah

Dari tabel diatas terlihat realisasi penyaluran dana kepada anggota belum mencapai target yang direncanakan dan perkembangan selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif.

Bila dilihat dari tingkat keberhasilan petani dalam mengelola dana pinjaman ini secara umum belum menunjukkan harapan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lubuak Simato. Ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Dana Pinjaman
Gapoktan Lubuak Simato Tahun 2014

Jumlah Anggota	Tingkat Keberhasilan		
	Berhasil	Kurang Berhasil	Tidak Berhasil
357	178	112	67
Persentase	49,86%	31,37%	18,77%

Sumber : Pengurus Gapoktan Lubuak Simato tahun 2014, diolah

Bila dilihat dari tabel diatas tingkat keberhasilan pengelolaan dana oleh anggota 49,86% adalah berhasil, 31,37% kurang berhasil dan sebesar 18,77% tidak berhasil. Walaupun pada kategori berhasil mendekati 50% namun tetap saja belum memenuhi harapan pengurus. Sementara pada kategori tidak berhasil sebesar 18,77% tetap saja ini merupakan kegagalan karena sekecil apapun ini berhubungan dengan pengelolaan dana.

Dengan melihat kondisi pengelolaan dana oleh LKMA Lubuak Simato mulai dari perkembangan modal dan penyaluran pinjaman, realisasi penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pengelolaan dana pinjaman, maka perlu dicermati apakah pengelolaan bantuan dana program BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di Jorong Lubuak Simato sudah efektif atau belum patut untuk diteliti.

Namun begitu kebijakan sektoral pemerintah ini patut kita dukung secara bersama-sama. Lebih dari itu di tingkat pelaksanaan perlu dilakukan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap apakah mekanisme penyaluran, pembinaan dan lain sebagainya sudah berjalan sesuai seperti yang diharapkan semula. Dengan kata lain apakah kebijakan bantuan dana ini sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agribisnis di desa Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas, maka saya tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PROGRAM BLM-PUAP OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI JORONG LUBUAK SIMATO KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis hanya membatasi masalah pada “Efektivitas

Pengelolaan Bantuan Dana Program BLM-PUAP Oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis menurut Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaana program BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan menurut Ekonomi Islam terhadap efektivitas pengelolaana program BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaana program BLM-PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Jorong Lubuak Simato.

Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui:

- 1) Efektivitas proses pinjaman dana
- 2) Efektivitas proses penyaluran pinjaman dana
- 3) Efektivitas proses pencairan
- 4) Efektivitas proses pendampingan

- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap keefektifan pengelolaan bantuan dana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang keefektifan pengelolaan bantuan dana.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus dibuktikan secara empiris yaitu : “Diduga pengelolaan dana program BLM-PUAP oleh LKMA di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota belum efektif”.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena LKMA di Jorong Lubuak Simato merupakan suatu lembaga keuangan yang khusus memodali kelompok tani di Jorong Lubuak Simato. Jadi penulis

ingin mengetahui seberapa efektif pengelolaan dana dari BLM-PUAP yang dilaksanakan oleh LKMA terhadap permodalan usaha agribisnis petani di Jorong Lubuak Simato tersebut dan apakah sudah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam.

2. Sumber dan Jenis Data

(a) Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁴

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan dan petani peminjam modal di Jorong Lubuak Simato.

(b) Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari responden yaitu anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini seperti tokoh masyarakat, RT RW dan data lainnya yang mendukung penelitian ini, serta dokumen-dokumen dan pengguna jasa PUAP.

3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

1. Pengamatan (*Observasi*) adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti.
2. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.¹⁵
3. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terdapat 1 Gapoktan untuk 17 kelompok dengan jumlah anggota 357 orang penerima dana BLM – PUAP tahun 2015 di Jorong Lubuak Simato Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin.¹⁶

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

¹⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. ke-2, hal. 23-24

¹⁶Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hlm. 78

E = toleransi kesalahan pengambilan sampel (10%)

Sehingga banyaknya sampel :

$$n = \frac{357}{1+357 \cdot 0.10^2}$$

$$n = \frac{357}{4.57} = 78,12 \text{ dibulatkan } 78.$$

Sehingga banyaknya sampel adalah 78 orang dengan teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.¹⁷

5. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Efektivitas sebagai variable Independen dengan sub variable adalah :

- 1) Efektivitas proses pinjaman dana
- 2) Efektivitas proses penyaluran pinjaman dana
- 3) Efektivitas proses pencairan
- 4) Efektivitas proses pendampingan

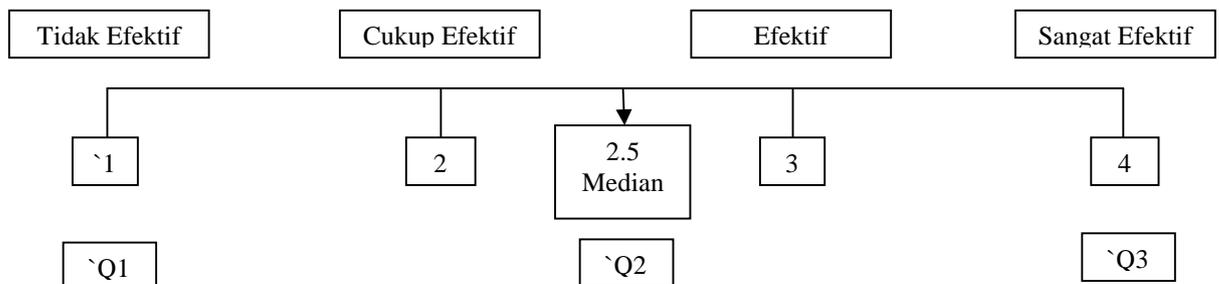
6. Teknik Analisis Data

- a. Efektivitas proses penyaluran dan penerimaan dana diperoleh berdasarkan kuesioner dan dinyatakan dalam skala Likert. Dengan skor 1-4, skor 1 = tidak efektif, skor 2 = cukup efektif, skor 3 = efektif dan skor 4 = sangat efektif. Ukuran efektivitas proses seleksi penerimaan dana, proses pencairan dana, proses pendampingan dan pengelolaan dana menggunakan kuartil (Q).¹⁸ Kuartil membagi data

¹⁷*Ibid.* hlm.82

¹⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok materi Statistik 1, (Statistic Deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. ke-2, hlm. 81-82

(n) yang berurutan atas 4 bagian sama banyak. Jadi, $Q1 = 1$, $Q2 = 2.5$ dan $Q3 = 4$.



Gambar 1. Efektivitas Proses Penyaluran dan Penerimaan Dana Pinjaman

b. Efektivitas pengelolaan dana pinjaman anggota Gapoktan

Untuk melihat apakah pengelolaan dana pinjaman oleh anggota Gapoktan efektif atau tidak, maka sebagai indikatornya dalam penelitian ini digunakan data pendapatan sebelum dan data pendapatan sesudah menerima dana pinjaman. Apakah terdapat perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dan data pendapatan sesudah menerima dana pinjaman, jika terdapat perbedaan nyata maka dapat dikatakan pengelolaan dana adalah efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota Gapoktan atau sebaliknya jika tidak terdapat perbedaan nyata maka dapat dikatakan pengelolaan dana adalah tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota Gapoktan.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah

dipahami. Dan menggunakan metode kuantitatif yaitu yaitu data yang berbentuk bilangan.¹⁹

Untuk menguji hipotesis ini dapat dilakukan dengan analisis statistic uji beda rata-rata atau t-hitung (*paired sample t-test*) dengan dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sum D^2 - \frac{(\sum D)^2}{n}}{n-1}}}$$

Keterangan:

\bar{X} = rata-rata skor sebelum

\bar{Y} = rata-rata skor sesudah

D = selisih skor sesudah dan sebelum

n = jumlah sampel

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang letak geografis Kecamatan Mungka, kondisi demografis, perkembangan LKMA Lubuak Simato, sejarah berdirinya LKMA di Jorong Lubuak Simato, struktur organisasi LKMA di Jorong Lubuak Simato.

¹⁹*Ibid.* hlm. 33

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang, Pengertian Efektif dan Efisien, Pengelolaan Dana Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, Sumber Pendapatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, Pengelolaan Pendanaan dalam Sistem Ekonomi Islam.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menceritakan tentang hasil penelitian yang terdiri dari:Efektivitas pengelolaan Bantuan Dana Program BLM – PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan tinjauan Ekonomi Islam tentang Efektivitas pengelolaan Bantuan Dana Program BLM – PUAP oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Jorong Lubuak Simato Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran – saran.

DAFTAR PUSTAKA